



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 173 TAHUN 2024
TENTANG
PANDUAN PENYUSUNAN RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2024.
- PERTAMA : Kebijakan pemenuhan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024 berfokus pada:
- a. penataan pegawai non-ASN di Instansi Pemerintah;
 - b. pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan;
 - c. perekrutan talenta-talenta baru; dan
 - d. pemenuhan talenta digital untuk mendukung program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- KEDUA : Jenis Pengadaan Pegawai ASN Tahun Anggaran 2024 meliputi:
- a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi Eks THK II dan pegawai non-ASN; dan
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA : Pengadaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA terdiri dari:
- a. Jabatan Fungsional; dan
 - b. Jabatan Pelaksana.

- KEEMPAT : Instansi Pemerintah menyusun rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024 sesuai dengan jumlah kebutuhan pegawai ASN yang disetujui oleh Menteri serta mengacu pada Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai ASN Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Rincian kebutuhan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT paling sedikit memuat:
- a. jenis pengadaan;
 - b. nama jabatan;
 - c. deskripsi jabatan;
 - d. kualifikasi pendidikan;
 - e. alokasi formasi;
 - f. unit penempatan; dan
 - g. rentang penghasilan.
- KEENAM : Rincian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA disampaikan melalui layanan elektronik yang mengacu pada petunjuk teknis yang disusun oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
- KETUJUH : BKN melakukan validasi terhadap rincian kebutuhan pegawai ASN yang terdiri atas jenis pengadaan, nama jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan pada masing-masing kategori jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Hasil validasi kebutuhan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETUJUH disampaikan kepada Menteri dalam bentuk pertimbangan teknis untuk selanjutnya menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebutuhan pegawai ASN.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 1 Maret 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI
NOMOR 173 TAHUN 2024
TENTANG
PANDUAN PENYUSUNAN RINCIAN KEBUTUHAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN
2024

PANDUAN PENYUSUNAN RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2024

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan mandat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai dengan nilai dasar Aparatur Sipil Negara, proses seleksi menjadi Aparatur Sipil Negara memegang peranan penting sebagai pintu awal dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara. Prinsip yang diterapkan adalah berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Adapun di tahun 2024 beberapa prioritas dalam proses pemenuhan Aparatur Sipil Negara secara nasional, yaitu memenuhi kebutuhan secara nasional untuk layanan dasar seperti tenaga guru dan tenaga kesehatan, perekrutan talenta-talenta baru, pemenuhan talenta digital untuk mendukung program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan pemenuhan jabatan untuk pengawasan program Pembangunan di Instansi Pemerintah, sehingga diharapkan putra-putri lulusan terbaik dapat ikut berkompetisi dalam seleksi calon ASN.

Selain itu, terdapat amanat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka perlu disusun

kebijakan perencanaan kebutuhan sebagai dasar untuk melakukan penataan Aparatur Sipil Negara secara terencana dan berkesinambungan.

Selanjutnya, dalam rangka menjalankan pemerintahan di Ibukota Negara Nusantara, Pemerintah juga menyiapkan rekrutmen ASN untuk Ibukota Negara Nusantara, yang akan menjadi pendorong lahirnya kota dunia baru dengan paradigma kerja baru sebagai SMART City yang *agile*, melayani sepenuh hati, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai ASN adalah kebijakan yang digunakan oleh Instansi Pemerintah sebagai acuan dalam menyusun kebutuhan pegawai ASN, sehingga didapatkan rincian jabatan dan syarat jabatan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing Instansi Pemerintah, serta proses pemenuhan kebutuhan yang mempertimbangkan prioritas pemenuhan Aparatur Sipil Negara secara nasional.

B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) adalah Eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
6. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.

7. Jabatan Fungsional (JF) adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Pelaksana (JP) adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Pengadaan ASN adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
12. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
13. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
14. Instansi Pembina merupakan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau kesekretariatan lembaga negara yang sesuai kekhususan tugas dan fungsinya ditetapkan menjadi instansi pembina suatu JF.
15. Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

C. JENIS JABATAN

1. Jenis Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
2. Jenis jabatan yang dapat diisi pada pengadaan pegawai ASN tahun 2024 merupakan jabatan nonmanajerial yang terdiri atas jabatan fungsional (JF) dan jabatan pelaksana (JP).
3. Kategori jabatan pada pengadaan pegawai ASN tahun 2024 terdiri atas JF Guru, JF di bidang kesehatan dan jabatan teknis.

4. JF Guru di Instansi Pemerintah Daerah dipenuhi melalui Pengadaan PPPK.
5. JF di bidang kesehatan dipenuhi melalui Pengadaan PNS dan PPPK.
6. Jabatan teknis dipenuhi melalui Pengadaan PNS dan PPPK.
7. Daftar jenis jabatan pada pengadaan pegawai ASN tahun 2024 tercantum pada Lampiran II.
8. Instansi Pemerintah yang menjadi prioritas dalam mendukung penguatan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam pengawasan program pembangunan diwajibkan untuk membuka lowongan kebutuhan JF Auditor dan/atau JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) apabila mendapatkan persetujuan prinsip kebutuhan CPNS tenaga teknis. Daftar Instansi Pemerintah yang menjadi prioritas tercantum pada Lampiran III.

D. KUALIFIKASI PENDIDIKAN

1. Kualifikasi pendidikan yang digunakan dalam penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai ASN merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang JF dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang JP.
2. Instansi Pembina JF dan Instansi Teknis JP menyampaikan rekomendasi kualifikasi pendidikan kepada BKN.
3. Berdasarkan rekomendasi Instansi Pembina JF dan Instansi Teknis JP, BKN menuangkan kualifikasi pendidikan ke dalam layanan elektronik sebagai acuan bagi Instansi Pemerintah dalam menyusun rincian kebutuhan pegawai ASN.
4. Dalam hal terdapat kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai, Menteri dapat menyesuaikan kualifikasi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. UNIT PENEMPATAN

1. Unit penempatan Pegawai ASN mengacu pada peta jabatan yang disusun oleh PPK.
2. Unit penempatan pegawai ASN hanya pada satuan kerja Instansi Pemerintah, lembaga non struktural, badan layanan umum/badan layanan umum daerah, atau lembaga penyiaran publik.
3. Unit penempatan pegawai ASN tidak dapat ditempatkan pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, lembaga internasional,

badan hukum lain yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan, dan badan swasta.

F. TATA CARA PENYUSUNAN RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2024

1. Setiap Instansi Pemerintah menyusun rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024 berdasarkan panduan sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Menteri ini.
2. Rincian kebutuhan disampaikan kepada Menteri dan Kepala BKN melalui layanan elektronik yang berpedoman pada petunjuk teknis yang disusun oleh BKN.
3. Rincian kebutuhan pegawai ASN paling sedikit memuat jenis pengadaan, nama jabatan, deskripsi jabatan, kualifikasi pendidikan, alokasi formasi, unit penempatan, dan rentang penghasilan.
4. Sebagai upaya penataan pegawai non-ASN, Instansi Pemerintah menyusun rincian kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diperuntukkan bagi Eks THK II dan pegawai non-ASN.
5. Instansi Pemerintah diwajibkan menyampaikan rincian kebutuhan pegawai ASN kepada Menteri dan Kepala BKN paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak menerima persetujuan prinsip jumlah kebutuhan pegawai ASN.
6. BKN melakukan validasi terhadap rincian kebutuhan pegawai ASN yang terdiri atas jenis pengadaan, nama jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan pada masing-masing kategori jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak Instansi Pemerintah menyampaikan rincian kebutuhan pegawai ASN.
7. BKN menyampaikan pertimbangan teknis hasil validasi rincian kebutuhan pegawai ASN kepada Menteri paling lama 5 (lima) hari kalender sejak rincian kebutuhan pegawai ASN telah divalidasi.
8. Menteri menetapkan rincian kebutuhan pegawai ASN dengan memperhatikan pertimbangan teknis BKN.
9. Penetapan rincian kebutuhan pegawai ASN disampaikan oleh Menteri kepada PPK Instansi Pemerintah untuk selanjutnya diumumkan dalam lowongan kebutuhan.

G. PENUTUP

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 1 Maret 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI
NOMOR 173 TAHUN 2024
TENTANG
PANDUAN PENYUSUNAN RINCIAN KEBUTUHAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN
2024

DAFTAR JENIS JABATAN PADA RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA TAHUN 2024

A. JABATAN FUNGSIONAL

NO.	NAMA JABATAN	JENJANG JABATAN	JENIS PENGADAAN	KEDUDUKAN
1	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
2	Polisi Pamong Praja	Pemula; Terampil; Ahli Pertama	CPNS	Provinsi; Kabupaten; Kota
3	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina; Provinsi; Kabupaten; Kota; Kecamatan
4	Administrator Database Kependudukan	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina; Provinsi; Kabupaten; Kota; Kecamatan
5	Pemadam Kebakaran	Pemula	CPNS dan PPPK	Provinsi; Kabupaten; Kota
		Terampil	PPPK	
6	Analisis Kebakaran	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Provinsi; Kabupaten; Kota
7	Penata Perizinan	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pembina; Provinsi; Kabupaten; Kota
8	Penerjemah	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
9	Diplomat	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pembina
10	Penata Kanselerai	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pembina
11	Pranata Informasi Diplomatik	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pembina

NO.	NAMA JABATAN	JENJANG JABATAN	JENIS PENGADAAN	KEDUDUKAN
12	Kataloger	Pemula; Terampil; Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pembina
13	Analisis Pertahanan Negara	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pembina
14	Pemeriksa Merek	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
15	Pemeriksa Paten	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
16	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
17	Pemeriksa Desain Industri	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
18	Penyuluh Hukum	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
19	Pemeriksa Keimigrasian	Pemula	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
20	Analisis Keimigrasian	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pembina
21	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan	Terampil	CPNS	Instansi Pembina
22	Pembimbing Kemasyarakatan	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pembina
23	Kurator Keperdataan	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
24	Analisis Hukum	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
25	Pembina Keamanan Masyarakat	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pembina
26	Pengaman Masyarakat	Pemula; Terampil	CPNS	Instansi Pembina
27	Analisis Kekayaan Intelektual	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
28	Analisis Anggaran	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pusat
29	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
30	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pusat
31	Pranata Keuangan APBN	Terampil	CPNS	Instansi Pusat
32	Penata Laksana Barang	Terampil	CPNS	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
33	Penilai Pemerintah	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
34	Pengamat Gunung Api	Pemula; Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
35	Penyelidik Bumi	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pusat; Provinsi

NO.	NAMA JABATAN	JENJANG JABATAN	JENIS PENGADAAN	KEDUDUKAN
36	Inspektur Ketenagalistrikan	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pusat; Provinsi
37	Inspektur Tambang	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pembina
38	Inspektur Minyak dan Gas Bumi	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pembina
39	Inspektur Panas Bumi	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pembina
40	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
41	Asesor Manajemen Mutu Industri	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
42	Pembina Industri	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
43	Penguji Mutu Barang	Pemula; Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
44	Penera	Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
		Ahli Pertama	CPNS	
45	Pengamat Tera	Pemula; Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
46	Pranata Laboratorium Kemetrolgian	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
47	Pengawas Kemetrolgian	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
48	Pengawas Perdagangan	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina; Provinsi; Kabupaten; Kota
49	Negosiator Perdagangan	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
50	Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
51	Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
52	Analisis Perdagangan	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
53	Penjamin Mutu Produk	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
54	Pengawas Benih Tanaman	Pemula; Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina; Provinsi
55	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Pemula; Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota

NO.	NAMA JABATAN	JENJANG JABATAN	JENIS PENGADAAN	KEDUDUKAN
56	Medik Veteriner	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
57	Paramedik Veteriner	Pemula; Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
58	Pengawas Bibit Ternak	Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
59	Pegawas Mutu Hasil Pertanian	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
60	Pengawas Mutu Pakan	Pemula; Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
61	Penyuluh Pertanian	Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
62	Analisis Pasar Hasil Pertanian	Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
63	Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
64	Analisis Perkarantina Tumbuhan	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
65	Pemeriksa Karantina Tumbuhan	Pemula; Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
66	Dokter Hewan Karantina	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
67	Paramedik Karantina Hewan	Pemula; Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
68	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
69	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina; Provinsi; Kabupaten; Kota
70	Penyuluh Kehutanan	Pemula; Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina; Provinsi
71	Polisi Kehutanan	Pemula; Terampil; Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
72	Pengendali Ekosistem Hutan	Pemula; Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina; Provinsi
73	Pengendali Dampak Lingkungan	Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
74	Pengawas Lingkungan Hidup	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota

NO.	NAMA JABATAN	JENJANG JABATAN	JENIS PENGADAAN	KEDUDUKAN
75	Penyuluh Lingkungan Hidup	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
76	Manggala Agni	Pemula	PPPK	Instansi Pembina; Provinsi
		Terampil	CPNS dan PPPK	
77	Teknisi Penerbangan	Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
78	Pengawas Keselamatan Pelayaran	Pemula; Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
79	Penguji Kendaraan Bermotor	Pemula; Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina; Kabupaten; Kota
80	Asisten Inspektur Angkutan Udara	Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
81	Inspektur Angkutan Udara	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
82	Asisten Inspektur Bandar Udara	Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
83	Inspektur Bandar Udara	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
84	Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan	Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
85	Inspektur Keamanan Penerbangan	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
86	Inspektur Navigasi Penerbangan	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
87	Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan	Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
88	Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
89	Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara	Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
90	Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
91	Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara	Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
92	Penguji Sarana Perkeretaapian	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
93	Penguji Prasarana Perkeretaapian	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
94	Inspektur Sarana Perkeretaapian	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina; Provinsi; Kabupaten; Kota
95	Inspektur Prasarana Perkeretaapian	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina; Provinsi; Kabupaten; Kota

NO.	NAMA JABATAN	JENJANG JABATAN	JENIS PENGADAAN	KEDUDUKAN
96	Auditor Perkeretaapian	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
97	Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian	Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
98	Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian	Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
99	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
100	Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	Pemula; Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
101	Pengawas Perikanan	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina; Provinsi
102	Asisten Pengawas Perikanan	Pemula; Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina; Provinsi
103	Penyuluh Perikanan	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
104	Asisten Penyuluh Perikanan	Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
105	Analisis Pasar Hasil Perikanan	Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
106	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina; Provinsi
107	Pengelola Kesehatan Ikan	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
108	Teknisi Kesehatan Ikan	Pemula; Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
109	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
110	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Pemula; Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
111	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
112	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
113	Inspektur Mutu Hasil Perikanan	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
114	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan	Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
115	Analisis Akuakultur	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota

NO.	NAMA JABATAN	JENJANG JABATAN	JENIS PENGADAAN	KEDUDUKAN
116	Teknisi Akuakultur	Pemula; Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
117	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina; Provinsi
118	Pengawas Ketenagakerjaan	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pusat; Provinsi
119	Instruktur	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
120	Mediator Hubungan Industrial	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pembina; Provinsi; Kabupaten; Kota
121	Pengantar Kerja	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
122	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi
123	Penggerak Swadaya Masyarakat	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
124	Pembina Jasa Konstruksi	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
125	Pengelola Sumber Daya Air	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
126	Penata Laksana Sumber Daya Air	Pemula; Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
127	Penata Kelola Jalan dan Jembatan	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
128	Penata Laksana Jalan dan Jembatan	Pemula; Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
129	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
130	Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	Pemula; Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
131	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
132	Penata Laksana Penyehatan Lingkungan	Pemula; Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
133	Penata Kelola Perumahan	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota

NO.	NAMA JABATAN	JENJANG JABATAN	JENIS PENGADAAN	KEDUDUKAN
134	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
135	Penata Ruang	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
136	Penata Kadastral	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
137	Asisten Penata Kadastral	Pemula; Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
138	Penata Pertanahan	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
139	Administrator Kesehatan	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
140	Apoteker	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
141	Asisten Apoteker	Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
142	Bidan	Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
143	Dokter	Ahli Pertama (Dokter Umum/Spesialis); Ahli Muda (Dokter Sub Spesialis)	CPNS	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
		Ahli Pertama (Dokter Umum); Ahli Muda (Dokter Spesialis/ Sub Spesialis)	PPPK	
144	Dokter Gigi	Ahli Pertama (Dokter Gigi/Spesialis)	CPNS	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
		Ahli Pertama (Dokter Gigi); Ahli Muda (Dokter Gigi Spesialis)	PPPK	
145	Entomolog Kesehatan	Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
146	Epidemiolog Kesehatan	Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
147	Fisioterapis	Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
148	Fisikawan Medis	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
149	Nutrisionis	Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota

NO.	NAMA JABATAN	JENJANG JABATAN	JENIS PENGADAAN	KEDUDUKAN
150	Okupasi Terapis	Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
151	Ortotis Prostetis	Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
152	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
153	Perawat	Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
154	Terapis Gigi dan Mulut	Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
155	Perekam Medis	Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
156	Pranata Laboratorium Kesehatan	Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
157	Psikolog Klinis	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
158	Radiografer	Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
159	Refraksionis Optisien	Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
160	Tenaga Sanitasi Lingkungan	Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
161	Teknisi Elektromedis	Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
162	Teknisi Gigi	Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
163	Teknisi Transfusi Darah	Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
164	Terapis Wicara	Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
165	Dokter Pendidik Klinis	Ahli Pertama (Spesialis); Ahli Muda (Sub Spesialis)	CPNS	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
		Ahli Muda (Spesialis/ Sub Spesialis)	PPPK	
166	Pembimbing Kesehatan Kerja	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
167	Asisten Penata Anestesi	Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota

NO.	NAMA JABATAN	JENJANG JABATAN	JENIS PENGADAAN	KEDUDUKAN
168	Penata Anestesi	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
169	Dosen	Asisten Ahli	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat
		Lektor	CPNS dan PPPK	
		Lektor Kepala	PPPK	
170	Guru	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat Provinsi; Kabupaten; Kota
			PPPK	
171	Pamong Belajar	Ahli Pertama	PPPK	Instansi Pembina; Provinsi; Kabupaten; Kota
172	Pengawas Sekolah	Ahli Muda	PPPK	Provinsi; Kabupaten; Kota
173	Pengembang Teknologi Pembelajaran	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
174	Pranata Laboratorium Pendidikan	Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
175	Pamong Budaya	Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
176	Widyaprada	Ahli Pertama	PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
177	Pengembang Kurikulum	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
178	Pengembang Penilaian Pendidikan	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
179	Widyabasa	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
180	Pekerja Sosial	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
181	Penyuluh Sosial	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina; Provinsi; Kabupaten; Kota
182	Penghulu	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
183	Penyuluh Agama	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
184	Pentashih Mushaf Al Quran	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
185	Pengembang Tafsir Al-Qur'an	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
186	Pengawas Jaminan Produk Halal	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
187	Pranata Hubungan Masyarakat	Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
188	Teknisi Siaran	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
189	Asisten Teknisi Siaran	Pemula; Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina

NO.	NAMA JABATAN	JENJANG JABATAN	JENIS PENGADAAN	KEDUDUKAN
190	Pranata Siaran	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
191	Asisten Pranata Siaran	Pemula; Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
192	Pengendali Frekuensi Radio	Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
193	Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pembina
194	Penguji Perangkat Telekomunikasi	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
195	Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi	Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
196	Inspektur Pos dan Informatika	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pembina
197	Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pembina
198	Perencana	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
199	Pelatih Olahraga	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
200	Asisten Pelatih Olahraga	Pemula; Terampil	CPNS	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
201	Pengawas Koperasi	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
202	Pengembang Kewirausahaan	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
203	Widyaiswara	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
204	Analisis Kebijakan	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
205	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
206	Arsiparis	Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
207	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
208	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
209	Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina

NO.	NAMA JABATAN	JENJANG JABATAN	JENIS PENGADAAN	KEDUDUKAN
210	Asesor SDM Aparatur	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
211	Pustakawan	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
212	Asisten Perpustakaan	Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
213	Statistisi	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
214	Asisten Statistisi	Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
215	Pranata Komputer	Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
216	Pengawas Radiasi	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
217	Peneliti	Ahli Pertama; Ahli Muda	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina; Provinsi; Kabupaten; Kota
218	Teknisi Perkebunrayaan	Pemula; Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
219	Analisis Perkebunrayaan	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
220	Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
221	Kurator Koleksi Hayati	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
222	Penata Penerbitan Ilmiah	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
223	Analisis Data Ilmiah	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
224	Teknisi Penelitian dan Perekayasa	Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
225	Perekayasa	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
226	Agen Intelijen	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pembina
227	Asisten Agen Intelijen	Terampil	CPNS	Instansi Pembina
228	Analisis Intelijen	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pembina
229	Pengawas Intelijen	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pembina
230	Pengembang Sistem Intelijen	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pembina

NO.	NAMA JABATAN	JENJANG JABATAN	JENIS PENGADAAN	KEDUDUKAN
231	Penata Kelola Intelijen	Ahli Pertama	CPNS	instansi Pembina
232	Asisten Penata Kelola Intelijen	Pemula; Terampil	CPNS	instansi Pembina
233	Sandiman	Terampil; Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
234	Manggala Informatika	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
235	Penyuluh Keluarga Berencana	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina; Pemprov DKI Jakarta
236	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pembina; Provinsi; Kabupaten; Kota
237	Petugas Lapangan Keluarga Berencana	Pemula	PPPK	Instansi Pembina; Pemprov DKI Jakarta
		Terampil	CPNS dan PPPK	
238	Surveyor Pemetaan	Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
239	Auditor	Terampil; Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
240	Analisis Ketahanan Pangan	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
241	Pengawas Farmasi dan Makanan	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
242	Pengamat Meteorologi dan Geofisika	Terampil; Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
243	Jaksa	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pembina
244	Pemeriksa	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pembina
245	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
246	Pranata Pencarian Pertolongan	Pemula; Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
247	Penyuluh Narkoba	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
248	Penyidik Badan Narkotika Nasional	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pembina
249	Konselor Adiksi	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
250	Asisten Konselor Adiksi	Terampil	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
251	Analisis APBN	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina

NO.	NAMA JABATAN	JENJANG JABATAN	JENIS PENGADAAN	KEDUDUKAN
252	Perisalah Legislatif	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat di Wilayah Papua, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh
253	Asisten Perisalah Legislatif	Terampil	CPNS dan PPPK	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat di Wilayah Papua, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh
254	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik

NO.	NAMA JABATAN	JENJANG JABATAN	JENIS PENGADAAN	KEDUDUKAN
				Indonesia
255	Analisis Legislatif	Ahli Pertama	CPNS	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
256	Analisis Transaksi Keuangan	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pembina
257	Penata Kelola Pemilihan Umum	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
258	Pranata Peradilan	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pembina
259	Analisis Standardisasi	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat
260	Metrolog	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat
261	Penata Kelola Perusahaan Negara	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
262	Penata Kehakiman	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
263	Analisis Kebencanaan	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
264	Penata Penanggulangan Bencana	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
265	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
266	Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
267	Analisis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pembina
268	Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Terampil	CPNS	Instansi Pembina
269	Penyelidik Tindak Pidana Korupsi	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pembina
270	Penata Perlindungan Saksi Dan Korban	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
271	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pembina
272	Penata Kelola Penanaman Modal	Ahli Pertama	CPNS dan PPPK	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota
273	Analisis Kerja Sama	Ahli Pertama	CPNS	Instansi Pusat; Provinsi; Kabupaten; Kota

B. JABATAN PELAKSANA

1) KLASIFIKASI KLEREK

NAMA JABATAN	JENIS PENGADAAN	KEDUDUKAN
Pengadministrasi Perkantoran	PPPK	Instansi Pemerintah
Penata Kelola Pemasarakatan	CPNS	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan	CPNS	Instansi Pemerintah
Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	CPNS	Instansi Pemerintah
Pengelola Administrasi Pemasarakatan	CPNS	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pengelola Sarana Pemasarakatan	CPNS	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Dokumentalis Hukum	CPNS	Instansi Pemerintah
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	CPNS	Instansi Pemerintah
Fasilitator Rehabilitasi	CPNS	Instansi Pemerintah
Konselor SDM	CPNS	Instansi Pemerintah
Penata Kelola Pemerintahan	CPNS	Instansi Pemerintah
Analisis Perkara Peradilan	CPNS	Sekretariat Mahkamah Agung
Pengelola Rumah Aman	CPNS	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Pengawas Pendataan Statistik	CPNS	Instansi Pemerintah
Desainer Buku	CPNS	Instansi Pemerintah
Ilustrator Buku	CPNS	Instansi Pemerintah
Pengembang Buku Elektronik	CPNS	Instansi Pemerintah
Penelaah Pengembangan Standar	CPNS	Instansi Pemerintah
Penelaah Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian	CPNS	Instansi Pemerintah
Penelaah Teknis Intelijen	CPNS	BIN
Pengolah Data Intelijen	CPNS	BIN
Pengelola Administrasi Intelijen	CPNS	BIN
Pengelola Penanganan Perkara	CPNS	Kejaksaan Agung
Petugas Barang Bukti	CPNS	Kejaksaan Agung
Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	CPNS	Instansi Pemerintah

NAMA JABATAN	JENIS PENGADAAN	KEDUDUKAN
Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	CPNS	Instansi Pemerintah
Penata Keprotokolan	CPNS	Instansi Pemerintah
Pengelola Keprotokolan	CPNS	Instansi Pemerintah

2) KLASIFIKASI OPERATOR

NAMA JABATAN	JENIS PENGADAAN	KEDUDUKAN
Penata Layanan Operasional	PPPK	Instansi Pemerintah
Pengelola Layanan Operasional	PPPK	Instansi Pemerintah
Operator Layanan Operasional	PPPK	Instansi Pemerintah
Pengelola Umum Operasional	PPPK	Instansi Pemerintah
Pengelola Trantibum	PPPK	Instansi Daerah
Pranata Trantibum	PPPK	Instansi Daerah
Penjaga Tahanan	CPNS	Kementerian Hukum dan HAM
Petugas Pengamanan Pemasarakatan	CPNS	Kementerian Hukum dan HAM
Protokol Kenegaraan	CPNS	Instansi Pusat Tertentu
Pengendali Konten Internet	CPNS	Instansi Pemerintah
Pemeriksa Forensik Digital	CPNS	Instansi Pemerintah
Penata Pemberantasan Narkotika	CPNS	Badan Narkotika Nasional
Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	CPNS	Instansi Pemerintah
Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	CPNS	Instansi Pemerintah
Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan	CPNS	Instansi Pemerintah
Fasilitator Bela Negara	CPNS	Kementerian Pertahanan
Pengelola Pencarian dan Pertolongan	CPNS	Instansi Pemerintah
Fasilitator Pemerintahan	CPNS	Instansi Pemerintah
Pranata Kewilayahan	CPNS	Instansi Pemerintah
Pamong Pemerintahan	CPNS	Instansi Pemerintah
Pengawas Penyelenggara Pemilu	CPNS	Instansi Pemerintah

NAMA JABATAN	JENIS PENGADAAN	KEDUDUKAN
Konsultan Industri	CPNS	Instansi Pemerintah
Pengawas Industri	CPNS	Instansi Pemerintah
Pelatih dan Perawat Satwa Liar	CPNS	Instansi Pemerintah
Pemelihara Tumbuhan	CPNS	Instansi Pemerintah
Petugas Pengaman Hutan dan Hasil Hutan	CPNS	Instansi Pemerintah
Penyusun Buku Braille dan Buku Bicara	CPNS	Instansi Pemerintah
Fasilitator Bahasa Isyarat	CPNS	Instansi Pemerintah
Penata Kelola Obat dan Makanan	CPNS	Instansi Pemerintah
Pengelola Layanan Kesehatan	CPNS	Instansi Pemerintah
Operator Layanan Kesehatan	CPNS	Instansi Pemerintah
Penata Kelola Layanan Kesehatan	CPNS	Instansi Pemerintah
Pawang Anjing Pelacak	CPNS	Instansi Pusat
Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	CPNS	Instansi Pemerintah
Penyuluh Bahasa	CPNS	Instansi Pemerintah
Perevitalisasi Bahasa dan Sastra	CPNS	Instansi Pemerintah
Editor Buku	CPNS	Instansi Pemerintah
Konservator	CPNS	Instansi Pemerintah
Kurator	CPNS	Instansi Pemerintah
Edukator	CPNS	Instansi Pemerintah
Polisi Khusus Cagar Budaya	CPNS	Instansi Pemerintah
Juru Pelihara Cagar Budaya	CPNS	Instansi Pemerintah
Penata Pameran	CPNS	Instansi Pemerintah
Registrar	CPNS	Instansi Pemerintah
Pengawas Hasil Penyensoran	CPNS	Instansi Pemerintah
Fasilitator Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	CPNS	Instansi Pemerintah
Penelaah Ketertelusuran Standar Pengukuran	CPNS	Instansi Pemerintah
Penata Kelola Pertambangan	CPNS	Instansi Pemerintah

NAMA JABATAN	JENIS PENGADAAN	KEDUDUKAN
Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan	CPNS	Instansi Pemerintah
Pengawas Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	CPNS	Instansi Pemerintah
Pengelola Keselamatan Ketenagalistrikan	CPNS	Instansi Pemerintah
Petugas Survei Geologi	CPNS	Instansi Pemerintah
Pengawas Jaringan Utilitas	CPNS	Instansi Pemerintah
Teknisi Sarana dan Prasarana	CPNS	Instansi Pemerintah
Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	CPNS	Instansi Pemerintah
Petugas Operasi dan Pemeliharaan	CPNS	Instansi Pemerintah
Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	CPNS	Instansi Pemerintah
Penata Kelola Pengadaan Tanah	CPNS	Instansi Pemerintah
Operator Alat Berat	CPNS	Instansi Pemerintah
Petugas Transportasi Darat	CPNS	Instansi Pemerintah
Petugas Transportasi Perkeretaapian	CPNS	Instansi Pemerintah
Pengawas Transportasi Darat	CPNS	Instansi Pemerintah
Pengawas Transportasi Perkeretaapian	CPNS	Instansi Pemerintah
Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi	CPNS	Kementerian Perhubungan
Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	CPNS	Kementerian Perhubungan
Pengatur Perjalanan Kereta Api	CPNS	Kementerian Perhubungan
Awak Sarana Perkeretaapian	CPNS	Kementerian Perhubungan
Teknisi Perkeretaapian	CPNS	Kementerian Perhubungan
Penguji Sumber Daya Manusia Perkeretaapian	CPNS	Kementerian Perhubungan
Pemeriksa Kecelakaan Kereta Api	CPNS	Kementerian Perhubungan
Personel Operasional Bandar Udara	CPNS	Kementerian Perhubungan
Personel Teknik dan Operasional Penerbangan Bidang Faskampem	CPNS	Kementerian Perhubungan
Personel Teknik dan Operasional Penerbangan Bidang Teknisi Peralatan dan Mesin	CPNS	Kementerian Perhubungan
Pengevaluasi Penerbangan	CPNS	Kementerian Perhubungan

NAMA JABATAN	JENIS PENGADAAN	KEDUDUKAN
Pengawas Penerbangan	CPNS	Kementerian Perhubungan
Personel Perawatan Pesawat Udara	CPNS	Kementerian Perhubungan
Pengawas Operasional Bandar Udara	CPNS	Kementerian Perhubungan
Personel Perawatan Peralatan Kalibrasi Penerbangan	CPNS	Kementerian Perhubungan
Petugas Unit Bengkel Keselamatan Pelayaran	CPNS	Kementerian Perhubungan
Penguji Peralatan Keselamatan Pelayaran	CPNS	Kementerian Perhubungan
Petugas Laboratorium Peralatan Keselamatan Pelayaran	CPNS	Kementerian Perhubungan
Petugas Telkompel	CPNS	Kementerian Perhubungan
Pengawas Pemanduan Kapal	CPNS	Kementerian Perhubungan
Pengawas Kegiatan Kepelabuhanan	CPNS	Kementerian Perhubungan
Pengawas Sarana dan Prasarana Kenavigasian	CPNS	Kementerian Perhubungan
Pengawas Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	CPNS	Kementerian Perhubungan
Pengawas Penanggulangan Pencemaran dan Musibah SAR	CPNS	Kementerian Perhubungan
Pengawas Salvage dan Pekerjaan Bawah Air	CPNS	Kementerian Perhubungan
Penata Keselamatan Pelayaran	CPNS	Kementerian Perhubungan
Penata Penegakan Hukum dan Diseminasi	CPNS	Kementerian Perhubungan
Penata Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	CPNS	Kementerian Perhubungan
Penilik Angkutan Laut	CPNS	Kementerian Perhubungan
Teknisi Menara Suar	CPNS	Kementerian Perhubungan
Penjaga Menara Suar	CPNS	Kementerian Perhubungan
Marine Radio	CPNS	Kementerian Perhubungan
Perekayasa Teknologi dan Pemberitaan	CPNS	Kementerian Perhubungan
Surveyor Kenavigasian	CPNS	Kementerian Perhubungan
Pengelola Peralatan Keselamatan Pelayaran	CPNS	Kementerian Perhubungan
Investigator Keselamatan Pelayaran	CPNS	Kementerian Perhubungan
Auditor ISPS Code	CPNS	Kementerian Perhubungan
Surveyor Pengangkutan Barang Berbahaya	CPNS	Kementerian Perhubungan

NAMA JABATAN	JENIS PENGADAAN	KEDUDUKAN
Penilik Kenavigasian	CPNS	Kementerian Perhubungan
Penilik Kepelabuhananan	CPNS	Kementerian Perhubungan
Penilik Kelaiklautan Kapal	CPNS	Kementerian Perhubungan

3) KLASIFIKASI TEKNISI

NAMA JABATAN	JENIS PENGADAAN	KEDUDUKAN
Petugas Ukur Kawasan Hutan	CPNS	Instansi Pemerintah
Pengendali Kedaruratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (PLB3)	CPNS	Instansi Pemerintah
Teknisi Mesin Alat Berat	CPNS	Instansi Pemerintah
Nakhoda Kapal Kelas I	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Nakhoda Kapal Kelas II	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Nakhoda Kapal Kelas III	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Nakhoda Kapal Kelas IV	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Nakhoda Kapal Kelas V	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas I	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas II	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas III	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas IV	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas V	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Mualim I Kapal Kelas I	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Mualim I Kapal Kelas II	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Mualim I Kapal Kelas III	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Mualim I Kapal Kelas IV	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Mualim II Kapal Kelas I	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Mualim II Kapal Kelas II	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Mualim II Kapal Kelas III	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Mualim III Kapal Kelas I	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu

NAMA JABATAN	JENIS PENGADAAN	KEDUDUKAN
Mualim III Kapal Kelas II	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Mualim III Kapal Kelas III	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Masinis I Kapal Kelas I	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Masinis I Kapal Kelas II	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Masinis I Kapal Kelas III	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Masinis I Kapal Kelas IV	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Masinis II Kapal Kelas I	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Masinis II Kapal Kelas II	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Masinis II Kapal Kelas III	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Masinis III Kapal Kelas I	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Masinis III Kapal Kelas II	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Markonis Kapal Kelas I	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Markonis Kapal Kelas II	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Markonis Kapal Kelas III	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Serang Kapal Kelas I	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Serang Kapal Kelas II	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Serang Kapal Kelas III	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Mandor Mesin Kapal Kelas I	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Mandor Mesin Kapal Kelas II	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Kerani Kapal Kelas I	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Kerani Kapal Kelas II	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Kerani Kapal Kelas III	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Kasab Deck Kapal Kelas I	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Kasab Deck Kapal Kelas II	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Kasab Mesin Kapal Kelas I	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Penyelam Scuba Kapal Kelas I	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Penyelam Scuba Kapal Kelas II	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu

NAMA JABATAN	JENIS PENGADAAN	KEDUDUKAN
Penyelam Scuba Kapal Kelas III	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Konstabel Kapal Kelas I	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Konstabel Kapal Kelas II	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Konstabel Kapal Kelas III	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Tenaga Penanggulangan Pencemaran Kapal Kelas I	CPNS	Kementerian Perhubungan
Teknisi Listrik Kapal Kelas I	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Teknisi Listrik Kapal Kelas II	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Juru Minyak Kapal Kelas I	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Juru Minyak Kapal Kelas II	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Juru Minyak Kapal Kelas III	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Jenang Kapal Kelas I	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Jenang Kapal Kelas II	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Juru Mudi Kapal Kelas I	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Juru Mudi Kapal Kelas II	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Juru Mudi Kapal Kelas III	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Kelasi Kapal Kelas I	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Kelasi Kapal Kelas II	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Kelasi Kapal Kelas III	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Kelasi Kapal Kelas IV	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Kelasi Kapal Kelas V	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Juru Mesin Kapal Kelas I	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Juru Mesin Kapal Kelas II	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Juru Mesin Kapal Kelas III	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Juru Masak Kapal Kelas I	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Juru Masak Kapal Kelas II	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Juru Masak Kapal Kelas III	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu
Juru Cuci Kapal Kelas I	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu

NAMA JABATAN	JENIS PENGADAAN	KEDUDUKAN
Personel Penerbangan Bidang Avsec	CPNS	Kementerian Perhubungan
Personel Penerbangan Bidang PKP-PK	CPNS	Kementerian Perhubungan
Pengawas Personel Penerbangan Bidang Avsec	CPNS	Kementerian Perhubungan
Pengawas Personel Penerbangan Bidang PKP-PK	CPNS	Kementerian Perhubungan
Co - Pilot	CPNS	Instansi Pemerintah tertentu

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 1 Maret 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI
NOMOR 173 TAHUN 2024
TENTANG
PANDUAN PENYUSUNAN RINCIAN KEBUTUHAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN
2024

DAFTAR INSTANSI YANG MENJADI PRIORITAS DALAM PENGUATAN PERAN
APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH (APIP)

NO.	INSTANSI	JF PPUPD	JF AUDITOR
1	Kabupaten Aceh Jaya	V	
2	Kabupaten Aceh Tenggara	V	
3	Kabupaten Asmat		V
4	Kabupaten Banggai Kepulauan	V	
5	Kabupaten Barito Timur	V	
6	Kabupaten Batu Bara	V	
7	Kabupaten Boalemo	V	
8	Kabupaten Bojonegoro	V	
9	Kabupaten Bulungan	V	
10	Kabupaten Buru Selatan	V	
11	Kabupaten Deiyai		V
12	Kabupaten Dogiyai		V
13	Kabupaten Ende		V
14	Kabupaten Fak-Fak		V
15	Kabupaten Halmahera Barat	V	
16	Kabupaten Halmahera Utara	V	

NO.	INSTANSI	JF PPUPD	JF AUDITOR
17	Kabupaten Jayawijaya	V	
18	Kabupaten Jombang	V	
19	Kabupaten Karimun	V	
20	Kabupaten Kepahiang	V	
21	Kabupaten Kolaka Utara	V	
22	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	V	
23	Kabupaten Lanny Jaya		V
24	Kabupaten Lingga	V	
25	Kabupaten Maluku Barat Daya		V
26	Kabupaten Maluku Tengah	V	
27	Kabupaten Mamberamo Raya		V
28	Kabupaten Mamberamo Tengah		V
29	Kabupaten Manokwari Selatan		V
30	Kabupaten Maybrat		V
31	Kabupaten Mimika		V
32	Kabupaten Murung Raya	V	
33	Kabupaten Nagekeo	V	
34	Kabupaten Nagan Raya	V	
35	Kabupaten Nias Barat	V	
36	Kabupaten Padang Lawas	V	
37	Kabupaten Pamekasan	V	
38	Kabupaten Pasuruan	V	
39	Kabupaten Pegunungan Arfak		V
40	Kabupaten Puncak Jaya		V
41	Kabupaten Sabu Raijua		V
42	Kabupaten Seram Bagian Timur	V	

NO.	INSTANSI	JF PPUPD	JF AUDITOR
43	Kabupaten Simeulue	V	
44	Kabupaten Sleman	V	
45	Kabupaten Sorong Selatan		V
46	Kabupaten Sumba Barat Daya	V	
47	Kabupaten Sumba Tengah		V
48	Kabupaten Sumenep	V	
49	Kabupaten Sumba Barat	V	
50	Kabupaten Supiori		V
51	Kabupaten Tambrauw		V
52	Kabupaten Tana Toraja	V	
53	Kabupaten Tanimbar		V
54	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	V	
55	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	V	
56	Kabupaten Tapanuli Tengah	V	
57	Kabupaten Teluk Bentuni		V
58	Kabupaten Temanggung	V	
59	Kabupaten Tolikara	V	
60	Kabupaten Waropen	V	
61	Kabupaten Waropen		V
62	Kabupaten Yahukimo	V	
63	Kabupaten Yalimo	V	
64	Kabupaten Yalimo		V
65	Kota Langsa	V	
66	Kota Lhokseumawe	V	
67	Kota Pagar Alam	V	
68	Kota Pasuruan	V	

NO.	INSTANSI	JF PPUPD	JF AUDITOR
69	Kota Sabang	V	
70	Kota Sorong		V
71	Kota Surabaya	V	
72	Provinsi Papua Pegunungan	V	V
73	Provinsi Papua Selatan	V	V
74	Provinsi Papua Tengah	V	V
TOTAL		50	27

Keterangan:

V = Jabatan yang wajib diusulkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 1 Maret 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS